

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	.....
Media Online	Tribun Jateng

Wilayah: Kota Semarang

Halaman 12

## PBB di Semarang Naik

### ► Pemkot Targetkan Pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Ini Rp 575 M

**SEMARANG, TRIBUN** - Pemerintah Kota Semarang bakal menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) pada 2022 ini. Kenaikan tarif PBB bervariasi sesuai kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) sehingga tidak terbatas pada range. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengatakan, pembangunan perlu pendapatan yang besar. Pendapatan terbesar saat ini yang bisa digenjut adalah pajak. Di sisi lain, PBB sudah tidak naik selama hampir tiga tahun.

"Tadi kami berusaha menyelesaikan sebuah keputusan PBB tahun 2022 ini akan dinaikkan," jelas Hendi, sapaannya, Kamis (17/2).

Pemerintah Kota Semarang juga akan melakukan optimalisasi wajib pajak. Pemkot mencatat masih banyak wajib pajak yang menunggak. Itu akan dioptimalkan melalui kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Semarang dalam hal penagihan. "Piutang tahun yang lalu, Pak Kajari mampu memberi bantuan untuk penagihan sekitar Rp 82 miliar. Tahun ini pun angkanya sama seperti itu. Jadi, pasti ini kerja bersama. Kami ucapkan terima kasih. Kejaksaab Negeri Kota Semarang," sambung Hendi.

Hendi juga membuat kebijakan lain terkait PBB yaitu membebaskan PBB bagi masyarakat yang memiliki bidang

#### STORY HIGHLIGHTS

- Pemerintah Kota Semarang menargetkan pendapatan sebesar Rp 2,2 triliun di 2022 di mana Rp 575 miliar di antaranya berasal dari pajak bumi dan bangunan
- Sudah hampir tiga tahun ini pajak bumi dan bangunan di Kota Semarang tidak mengalami kenaikan sehingga pada 2022 ini Pemkot Semarang mengerek tarif PBB
- Wali Kota Semarang juga akan lakukan optimalisasi karena sejauh ini masih banyak wajib pajak yang menunggak
- Pemkot Semarang bakal menggandeng Kejaksaan Negeri Semarang untuk melakukan penagihan piutang seperti yang dilakukan tahun lalu

tanah dan bangunan kurang dari Rp 250 juta. Sedangkan, bidang-bidang tanah yang kosong di sepanjang jalur protokol akan dikenakan tarif pajak progresif sebesar 20 persen. "Misalnya, pernah lewat Jalan Pahlawan, Kantor Polda naik sebelah kanan ada dulu namanya Siranda. Sekarang

mangkrak. Nah, itu jalur protokol. Maka, PBB yang bersangkutan akan kami tambah lagi 20 persen dari PBB awal," jelas dia.

Pihaknya menerapkan tarif pajak progresif karena ingin aset masyarakat yang berada di tepi jalan protokol bisa semaksimal mungkin dimanfaatkan. Sehingga, akan ada aktivitas ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan Kota Semarang. "Ayo manfaatkan aset panjenengan semaksimal mungkin, terjadi rekrutmen tenaga kerja. Kemudian, terjadi aktivitas ekonomi dan kotanya pasti tumbuh bisa melebihi kota-kota yang lain, seperti contoh di Kota Lama," lanjut Hendi.

Hendi memaparkan, pertumbuhan Kota Lama terus bergerak. Hanya saja, masih ada beberapa gedung yang masih mangkrak. Dia pun mengambil kebijakan tetap menggratiskan izin mendirikan bangunan (IMB) disana. PBB biasanya mendapat insentif 50 persen. Namun, pihaknya menghapus insentif tersebut khusus gedung yang belum direstorasi atau mangkrak di Kota Lama. "Jadi, mereka harus bayar penuh PBBnya," ucap dia.

Hendi berharap, masyarakat bisa memahami keputusan itu dengan harapan bisa memunculkan aktivitas ekonomi yang semakin meningkat di

Kota Semarang. Pihaknya akan melakukan pembangunan yang lebih dari sebelumnya diiringi dengan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Target PBB pada 2022 ini sebesar Rp 575 miliar. Sedangkan, target pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp 2,2 triliun.

Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Indriyarsi mengatakan, cukup banyak perubahan terjadi di Kota Semarang. Maka dari itu, pihaknya melakukan pendataan ulang. Pendataan ulang dimungkinkan memunculkan kenaikan besaran pajak menyesuaikan dengan nilai dan ukuran luas bangunan.

"Kami melakukan pendataan ulang karena disinyalir kondisi yang ada selama ini berbeda dengan kenyataan di lapangan. Contoh, tanah sebelumnya kosong sekarang sudah ada bangunan. Bangunan semula tipe 60, sudah dibangun lagi. Ada kenaikan tapi kenaikan karena kondisi di lapangan," ujar lin, sapaannya, Jumat (11/2) lalu.

Menurutnya, pendataan ditargetkan rampung Februari ini. Kemudian, Bapenda akan mencetak surat pemberitahuan pajak daerah (SPPD) PBB dengan harapan bisa mulai didistribusikan pada Maret mendatang. (eyf)